

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
Nomor : 037/KAK/412.303/2018

1. Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Nama Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gaji Daerah
3. Latar Belakang :
 - a. Dasar Hukum :
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;
 - Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis BPKKD
 - b. Gambaran Umum :

Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak-haknya selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang PNS. Untuk memperoleh data yang akurat dimaksud selain dibutuhkan aplikasi yang handal tentang data PNS

juga diperlukan rekonsiliasi secara berkala dengan seluruh SKPD untuk mengetahui data yang paling terbaru tentang mutasi pegawai.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan :

- Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya
- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya:
- Data PNSD Tahun 2016 : 11.202 orang yang terinci :
 - PNS dan Guru 10.818 orang
 - Guru DPK 338 orang
 - Tugas Belajar/Kades/KPU 46 orang
- Data Mutasi Pegawai
- Jumlah SKPP yang diterbitkan pada tahun 2016 sebanyak 1.512
- Aturan gaji pokok dan tunjangan pegawai
- SP2D Gaji Tahun 2016 sebanyak 3.239
- Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya
- Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya

4. Masalah yang ingin dipecahkan :

- Kekurangan dalam pembayaran gaji dan tunjangan PNS
- Kelebihan dalam pembayaran gaji tunjangan PNS
- Pembayaran hak PNS tidak sesuai ketentuan

5. Harapan dan Keinginan dari Seluruh Stakeholder dan Shareholder (Masyarakat Sekitar)

- Tercapainya Misi Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- Tidak ada kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran gaji PNS
- SK Mutasi Pegawai (pindah tempat, kenaikan pangkat, penetapan tugas belajar dan lain-lainnya) diterbitkan tepat waktu

6. Tujuan Kegiatan

- Diterimanya hak-hak PNS sesuai ketentuan yang berlaku

- Tertib administrasi pengelolaan gaji daerah
7. Hal yang Harus Ada dan yang Tidak Boleh Ada
- a. Hal yang harus ada :
- SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPKP
 - SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPKP
 - SIMGAJI dari PT. TASPEN
 - DATA PNS
 - SK PNS
- b. Hal yang tidak boleh ada :
- Kesalahan dalam penetapan hak PNS
 - Keterlambatan penerbitan SK Mutasi Pegawai (pindah tempat, kenaikan pangkat, penetapan tugas belajar dan lain-lainnya)
8. Wujud Konkrit Kegiatan yang akan dilaksanakan
- Melaksanakan penelitian berkas SPM Gaji, Tambahan Penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan Guri, Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi dan belanja tidak langsung pegawai lainnya dari SKPD
 - Memproses penerbitan SP2D Gaji, Tambahan Penghasilan PNS, Tambahan Penghasilan Guri, Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi dan belanja tidak langsung pegawai lainnya
 - Memproses SKPP
 - Melaksanakan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP), BPJS Kesehatan, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Perumahan bagi PNS
9. Dukungan yang diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan
- SDM yang kompeten
 - Keputusan Penguji SP2D Gaji
 - SIMDA Pengelolaan Gaji
10. Waktu dan tempat Pelaksanaan kegiatan
- Bulan januari sampai dengan desember 2019

11. Dana yang dibutuhkan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 274.689.500,-

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Perbendaharaan

PPTK,
Kasubid Belanja Gaji

VEVI RAHMANAWATI, S.Sos. MM.

Pembina
NIP.19740116 199703 2 002

L A S T O

Penata
NIP.19601212 198003 1 010

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19641117 199301 1 003